

Ketua DPRD Jateng Jalani Sidang Promosi Doktor

Rukma Sempat Dikira Sedang Sidak saat Penelitian untuk Disertasi



TRIBUNJATENG/DANIEL ARI FURUKO

BERCERITA - Rukma Setyabudi saat menceritakan pengalamannya melakukan penelitian untuk disertasinya, Rabu (29/8).

Kamis (30/8) ini, Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, akan menjalani sidang promosi doktor Program Studi Doktor Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (Undip). Ada kisah menarik ketika dia menggarap disertasinya. Seperti apa?

RUKMA mengangkat disertasi berjudul "Analisis Peran Aktor Kebijakan dan Jejar Aktor Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan KTP-EI di Kota Semarang". Di balik proses menuntaskan disertasinya itu, Rukma menceritakan pengalamannya menghimpun

data-data KTP elektronik di salah satu kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang.

"Kalau mungkin yang melakukan penelitian yang lain (bukan pejabat), ada kemungkinan data tidak diberikan. Kalau kami,

KE HALAMAN 17

Rukma Sempat...

DARI HALAMAN 9

langsung diberikan semua. Mereka itu masih ewuh-pekuwuh. Itu memang ada dalam budaya kita, namanya Mikul Dhuwur Mendhem Jero. Mereka takut kalau pimpinannya disalahkan karena ada kelaurangan di masa sebelumnya", kata Rukma cekikikan di ruang kerjanya, Gedung Berlian, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (29/8).

Kala itu, Rukma datang bersama beberapa staf pribadi. Para petugas kantor dinas itu, lanjut dia, pun kaget dan beberapa orang ada yang kelabakan, saat berpapasan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah itu.

"Mereka kira saya sedang sidak. Waktu itu saya langsung berpikir, oh iya, saya belum memberitahu maksud niat kedatangan untuk penelitian, bukan sidak (inspeksi mendadak)," ujarnya.

Meski sudah mengaku sedang penelitian, Rukma menuturkan para pegawai dinas tetap tidak percaya.

Mereka masih memandang pria kelahiran Purworejo itu sebagai wakil rakyat yang melakukan sidak.

"Tolong pak, jangan bilang kalau yang memberi data ini saya," ucap dia menirukan gaya bicara petugas yang dimaksud, sambil tertawa.

"Ya akhirnya saya bilang pelan-pelan, saya kasih pemahaman kalau saya sedang penelitian untuk disertasi, tidak sedang bertugas. Tidak ada niatan mencari kesalahan seperti yang dipikirkan," imbuh Rukma.

Mantan guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Purworejo itu menuturkan, membuat disertasi itu gampang-gampang sulit. Gampang bila sedang berniat, sulitnya halnya saat malas. Kemalasan itu sering datang lantaran fokusnya menyelesaikan disertasi tersaingi dengan kepadatan jadwal sebagai wakil rakyat.

Rukma mengaku ada sekitar dua sampai tiga tahun sempat padam semangat menggarap disertasi. Niatannya kembali ketika pihak

kampus mengingatkan ada ancaman drop out (DO) bila tak kunjung menyelesaikannya.

"Lalu saya pikir lagi, eman-eman kalau gak selesai. Itu termasuk the power of DO, takut kena DO. Lalu saya kebut enam bulan ini selesai," ujar politisi PDIP itu.

Dalam waktu enam bulan itu, lanjutnya, Rukma menghadapi masalah berupa manajemen waktu. Setiap hari, dia harus meluangkan waktu tiga jam untuk mengetik disertasi. Pria kelahiran 27 Februari 1958 itu biasanya mulai mengerjakan karya ilmiah tersebut lewat tengah malam atau awal pagi hari.

"Saya sempat kehilangan kualitas tidur waktu itu. Kalau sudah selesai begini sudah lega," ungkap dia.

Terkait penelitiannya untuk disertasi, Rukma menjelaskan bahwa, tidak sekadar menganalisa atau meneliti efektifitas pembuatan KTP-EI (elektronik). "Bukan cuma itu, tapi setelah itu. Ketika semua penduduk sudah dapat KTP-EI, apakah itu betul-betul bisa

digunakan sebagai sumber data tunggal? dan implementasinya bisa digunakan sejauh itu?" papar Rukma.

Sebagai informasi, abstraksi studi itu mengeksplorasi penerapan Actors-Network-Theory (ANT), sebuah paradigma baru dalam teori ilmu sosial, terhadap implementasi kebijakan KIP-EI di Kota Semarang.

ANT, kata Rukma, menawarkan sebuah model untuk memahami dinamika yang mendasari interdependensi antara para aktor yang bekerja bersama dalam menerapkan kebijakan dan pemanfaatan data dalam KTP-EI, untuk kebijakan kependudukan lain.

"Saya berharap disertasi ini nantinya bermanfaat untuk pelayanan masyarakat, sesuai dengan tugas saya. Karena ini tentang administrasi publik. Administrasi publik ini berkenaan dengan bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rakyat," tandasnya. (dna)